

Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM Sthela Official

Aisha Nanda Fadhila¹, Aliffa Salsabila², Cindy Riski Ananda³, Dian Flora Sarasawati⁴,
Suci Nurhayati⁵, Ramdani Bayu Putra⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Email : aishanandafadhila01@gmail.com¹; aliffasalsabila3@gmail.com²; cindyananda128@gmail.com³
dianflra14@gmail.com⁴; shuci.nurhayati02@gmail.com⁵; ramdanibayuputra@gmail.com⁶

Abstrak

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan usaha mereka. SAK ETAP adalah suatu standar akuntansi keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan usaha kecil yang dibentuk oleh masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seorang perorangan. UMKM memiliki perkembangan yang cukup pesat di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bermunculan UMKM dengan berbagai bidang usaha dan bahkan UMKM telah menjadi penyelamat dan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: *Akuntansi, Standar akuntansi, Akuntabilitas public, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), format, artikel.*

Abstract

The Indonesian Institute of Accountants has issued Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) with the aim of making it easier for MSME actors to prepare financial reports for their businesses. SAK ETAP is a financial accounting standard for entities that do not have significant public accountability and publish general-purpose financial reports for external users. Entities without public accountability are entities that do not have significant public accountability and issue general purpose financial statements for external users. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are small business activities formed by the community whose establishment is based on the initiative of an individual. MSMEs have developed quite rapidly in various regions. In Indonesia itself, there have been a lot of MSMEs popping up with various business fields and even MSMEs have become the saviors and pillars of Indonesia's economic growth.

Keywords: *Accounting, Accounting Standards, Public Accountability, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan usaha kecil yang dibentuk oleh masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seorang perorangan. UMKM memiliki perkembangan yang cukup pesat di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali bermunculan UMKM dengan berbagai bidang usaha dan bahkan UMKM telah menjadi penyelamat dan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia namun di balik keunggulannya, UMKM masih memiliki beberapa kelemahan yang hingga kini masih harus diperbaiki. Kelemahan tersebut cukup bervariasi, namun disini yang memiliki dampak cukup signifikan dalam perkembangan UMKM salah satunya adalah Informasi Akuntansi yang ada pada UMKM.

Akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih terbilang rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut dikarenakan rendahnya pendidikan pelaku UMKM, kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan masih belum adanya peraturan yang mewajibkan bisnis UMKM untuk menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan. Beberapa pelaku UMKM belum melakukan

pencatatan menurut kaidah akuntansi, sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pinjaman dari pihak luar perusahaan seperti pemerintah, calon investor dan perbankan akibat tidak jelasnya sistem akuntansi mereka. Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena harus memerlukan waktu lama untuk mengumpulkan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa usahanya layak untuk diberi pinjaman dengan mewawancarai pelaku UMKM dan melihat langsung kondisi usahanya. Padahal Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil dan menengah.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan usaha mereka. Diterbitkannya SAK ETAP ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat menerapkannya dengan lebih mudah dan dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan laporan keuangan tersebut. Penyelenggaraan laporan keuangan ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi perkembangan UMKM yang diantaranya adalah pelaku UMKM dapat lebih mudah untuk mengetahui bagaimana perkembangan usahanya karena laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal dari UMKM tersebut, dengan adanya laporan keuangan pada UMKM, maka akan membantu pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan mengenai usahanya di masa depan.

Kondisi UMKM di Kecamatan Baso khususnya di Sthela Official tidak jauh berbeda, mereka masih banyak mengalami kesulitan dalam mempraktekan akuntansi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak memadai dan juga tidak akurat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994.

Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan :

- 1) Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 2) Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 menyatakan bahwa usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi tingginya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari (1) bidang usaha (Firma, CV, PT, dan koperasi); dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambahan hutan, penambangan, pedagang barang dan jasa).

SAK-ETAP muncul sebagai solusi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP adalah suatu standar akuntansi keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur, lembaga pemeringkat kredit dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Perusahaan kecil menengah akan mampu Bagian ini berisi kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis penelitian (jika ada) harus dibangun dari konsep teori dan didukung oleh kajian empiris (penelitian sebelumnya).

Untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit, serta mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk pengembangan usaha. SAK-ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya dan tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

SAK ETAP digunakan bagi perusahaan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP akan menjawab kesulitan para pelaku koperasi dan UKM dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi suatu pelaporan keuangan yang efektif namun juga tidak serumit SAK Umum, sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi ke depannya.

Unsur-unsur laporan, berdasarkan SAK ETAP adalah :

- a. Neraca
Menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan.
- b. Laporan Laba Rugi
Menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode
- c. Laporan perubahan ekuitas
Menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut.
- d. Laporan laba rugi dan saldo laba
Menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan.
- e. Laporan arus kas
Menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- f. Catatan atas laporan keuangan
Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan secara naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pelaporan.

Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu : 1. Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. 2. Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks. 3. Perbedaan dengan PSAK No. 27 tahun 1998 tidak ada kewajiban Koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA), dan 4. Laporan keuangan dengan ETAP, yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan (lihat halaman 17 SAK ETAP). Berdasarkan PSAK ETAP, laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dengan wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan pada SAK ETAP Bab 2 konsep dan prinsip persuasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif yang dilakukan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya sejarah, kondisi usaha, serta identifikasi aktivitas-aktivitas keuangannya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah. Penelitian ini dilakukan pada Sthela Official yang beralamat di Bakuang Kenagarian Simarasok Kabupaten Agam.

Jenis data kuantitatif yaitu seluruh informasi yang dikumpulkan dari lapangan yang dapat menyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini, data tersebut berupa data bukti transaksi yang nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan, dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, meliputi gambaran umum usaha Sthela Official pada kondisi saat ini. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan, dan data sekunder yang diperoleh melalui orang lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM Sthela Official yang menjadi objek penelitian ini sudah berdiri sejak tahun 2020 oleh Ibu Stephanie Laurencia yang bergerak pada bidang perdagangan atau penjualan pakaian. Struktur organisasi di suatu usaha sangat diperlukan untuk mencapai tujuan usaha dan kelancaran menjalankan usaha, maka diperlukanlah suatu struktur organisasi. Struktur organisasi UMKM Sthela Official sangat sederhana karena dikelola sendiri oleh Ibu Stephanie Laurencia.

Kegiatan operasi dari UKM Sthela Official adalah penjualan pakaian wanita. Sthela Official juga menyediakan atau menjual berbagai jenis pakaian wanita dari anak remaja sampai wanita dewasa. Pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Stephanie Laurencia yaitu melalui toko yang ada di Kec. Baso dan melalui media sosial berupa Instagram, Whatsapp, dan Shopee.

Menyusun laporan keuangan Sthela Official berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan ini disusun berdasarkan informasi dan bukti catatan yang dimiliki oleh Sthela Official untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 yang kemudian disesuaikan dengan kaidah penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP.

a. Laporan Laba Rugi

Entitas menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan laba rugi memasukkan semua pos dan beban yang diakui dalam bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan suatu periode. Dalam laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan laba atau rugi neto dari perusahaan. Laporan laba rugi Sthela Official dibuat berdasarkan atas informasi yang diberikan pemilik dan catatan keuangan yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 yang kemudian disesuaikan dengan SAK ETAP. Dari informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi Sthela Official adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Sthela Official
STHELA OFFICIAL
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2020

Penjualan		Rp 179.240.993
Persediaan 1 Jan 2020	Rp 29.000.000	
Pembelian	<u>Rp 96.500.000</u>	
Persediaan yang siap untuk dijual	Rp 125.500.000	
Persediaan 31 Des 2020	<u>Rp 34.000.000</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 91.500.000</u>
Laba Kotor		Rp 87.740.993
Beban Operasional		

Beban Pulsa	Rp 3.600.000	
Beban Gaji (Hanya Saat Lebaran)	Rp 750.000	
Beban Kendaraan	<u>Rp 2.400.000</u>	
Total Beban Operasional		<u>Rp 6.750.000</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 80.990.993

b. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal yang dibuat peneliti menggunakan laporan perubahan modal dalam periode akuntansi mulai tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Laporan dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dan kemudian diolah, disesuaikan dengan kaidah pelaporan sesuai SAK ETAP. Adapun laporan perubahan modal sebagai berikut :

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Modal Sthela Official

**STHELA OFFICIAL
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PER 31 DESEMBER 2020**

Modal Awal		Rp 38.000.000
Laba Bersih	Rp 80.990.993	
Prive	-	
		<u>Rp 80.990.993</u>
Modal 31 Desember 2020		Rp 118.990.993

c. Neraca

Berdasarkan SAK ETAP neraca menyajikan aset, kewajiban dan modal suatu entitas pada suatu tanggal tertentu yaitu pada akhir periode. Neraca Sthela Official dibuat atas dasar informasi dan catatan yang dibuat oleh pemilik sebagai berikut:

Tabel 4.3 Neraca Sthela Official

**STHELA OFFICIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020**

Kas	Rp 45.141.993	Utang Dagang	Rp 10.000.000
Piutang Usaha	Rp 40.000.000		
Persediaan	Rp 34.000.000		
Perlengkapan	Rp 8.640.000	Modal	Rp 118.990.993
Peralatan	Rp 1.209.000		
Total Aktiva	Rp 128.990.993	Total Passiva	Rp 128.990.993

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas sesuai dengan kaidah SAK ETAP menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitaas, yang menunjukkan perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Adapun laporan arus kas Sthela Official sebagai berikut :

Tabel 4.4 Laporan Perubahan Modal Sthela Official

STHELA OFFICIAL
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2020

Aktivitas Operasi		
Pembelian Perlengkapan	Rp 8.640.000	
Pembayaran beban Pulsa	Rp 3.600.000	
Pembayaran Beban Gaji	Rp 750.000	
Pembayaran Beban Kendaraan	<u>Rp 2.400.000</u>	
Total Aktivitas Operasi		Rp15.390.000
Aktivitas Investasi		Rp 5.000.000
Aktivitas Pendanaan		-
Kas 1 Januari 2020		Rp10.390.000
Kas 31 Desember 2020		Rp45.141.993

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan Sthela Official dibuat berdasarkan informasi yang didapatkan dari perusahaan yang kemudian diolah peneliti dan disesuaikan dengan kaidah SAK ETAP. Catatan atas laporan keuangan Sthela Official berisi pernyataan bahwa laporan telah disusun sesuai SAK ETAP, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, dan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun catatan atas laporan keuangan dari Sthela Official yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan Sthela Official

STHELA OFFICIAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020

1. UMUM

Sthela Official didirikan oleh Ibu Stephanie Laurencia yang merupakan pemilik dari perusahaan. Sthela Official merupakan UMKM milik pribadi yang bergerak dibidang penjualan pakaian. Sthela Official berada di Bakuang Kenagarian Simarasok Kabupaten Agam yang merupakan toko dari UMKM itu sendiri.

2. PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK ETAP

Sthela Official mulai 31 Desember 2020 bersedia menyusun laporan keuangan perusahaan berdasarkan SAK ETAP, mematuhi semua persyaratan dalam pembuatan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN

a. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual sesuai dengan SAK ETAP, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

b. Instrumen Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku dalam instrumen keuangan dari UMKM yaitu :

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha
3. Persediaan barang dagang
4. Perlengkapan toko
5. Utang dagang
6. Modal

Sistem Pencatatan Keuangan yang Digunakan di UMKM Sthela Official

Sthela Official merupakan jenis usaha yang bergerak dibidang penjualan pakaian, yang beralamat di

Bakuang Kenagarian Simarasok Kabupaten Agam. Pengelolaan usaha ini dikelola oleh Ibu Stephanie Laurencia dalam hal pencatatan keuangannya.

UMKM Sthela Official mengetahui bahwa pencatatan keuangan suatu usaha itu sangat penting dilakukan, dengan melakukan pencatatan keuangan UMKM sendiri dapat mengetahui seberapa besar pemasukan yang dilakukan pada kegiatan di UMKM tersebut, sehingga pemilik UMKM dapat mengetahui bagaimana peningkatan kinerja dalam usaha.

Penerapan SAK ETAP pada UMKM Sthela Official Dalam Pencatatan Keuangan

Penerapan pencatatan keuangan pada UMKM yang sesuai dengan SAK ETAP memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan. Manfaat yang dihasilkan dalam pencatatan keuangan pada UMKM yang dilaksanakan dengan benar dan berbasis SAK ETAP akan memberikan manfaat, yaitu :

1. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan Laporan Laba Rugi (*Income Statement*).
2. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan Neraca (*Balance Sheet*).
3. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama. Selama ini pelaku UMKM Sthela Official, memang belum pernah mendapat pelatihan penyusunan Laporan laba rugi. Penyebab tidak diterapkannya pencatatan keuangan yang berbasis SAK ETAP pengetahuan pemilik dengan adanya SAK ETAP. Penyebab tidak diterapkannya pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP adalah selain kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi juga tidak adanya pengendalian sosial sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan keuangan untuk menerapkan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku di umum, dan seharusnya UMKM sudah mengacu pada SAK ETAP.

SIMPULAN

UMKM membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat dengan tujuan agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu upaya pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun laporan keuangan tiap periode untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pembukuan yang dilakukan UMKM Sthela Official masih sebatas pencatatan seperti *single entry* yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tetapi entitas menganggapnya sebagai laporan keuangan, UMKM belum melakukan prosedur pembukuan dalam akuntansi yang dikenal dengan istilah penjurnalan/pencatatan, pengelompokan transaksi dalam buku besar dan pengiktisaran transaksi, dan UMKM belum menerapkan SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm Kota Tegal. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(2), 259. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531>
- Hidayah, N., & Muntiah, N. S. (2019). Persepsi Pelaku Ukm Terhadap Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.39-55>
- Sari, E. P. (2018). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Rntitas Tanpa Kuntabilitas Publik Pada Pencatatan Keuangan UMKM Kios Pulsa Happy Call Surabaya*. 1–15.
- Warsadi, K. A., Herawati, N. T., & Julianto, P. (2017). Penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada PT. mama jaya. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.